



CAPAIAN SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA SEMESTER I/2017



#energiberkeadilan

Jakarta, 9 Agustus 2017



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)



LANDMARK PENGELOLAAN MINERBA

HILIRISASI MINERAL UNTUK SEBESAR - BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT



Peningkatan
Pendapatan Negara



Terciptanya
lapangan kerja bagi
Rakyat Indonesia



Manfaat bagi
pertumbuhan ekonomi
daerah dan nasional



Iklim investasi
yang kondusif



Divestasi harus
dilaksanakan hingga
mencapai 51%

Keterangan

IUP : Izin Usaha Pertambangan
IUPK : Izin Usaha Pertambangan Khusus
OP : Operasi Produksi
KK : Kontrak Karya
Smelter : Fasilitas untuk mengolah
hasil tambang
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PP Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK lebih
memberikan kepastian investasi (5 tahun sebelum izin berakhir)

Divestasi saham hingga 51% secara bertahap

Penetapan harga patokan untuk penjualan
mineral dan batubara

KK hanya boleh mengekspor hasil pemurnian

Permen ESDM No. 5 Thn 2017

Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan
dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau
pemurnian **WAJIB** melakukan pengolahan dan pemurnian
sesuai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian

Melakukan penjualan hasil pemurnian
ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian

IUP, IUP OP, IUPK OP, IUP Khusus Pengolahan dan/atau pemurnian
dapat menjual konsentrat selama 5 tahun dengan syarat :

- 1) Telah atau sedang bangun smelter;
- 2) Membayar bea keluar ;
- 3) Khusus bagi pemegang KK wajib mengubah bentuk pengusahaannya
menjadi IUPK OP

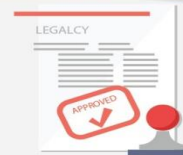
Permen ESDM No. 6 Thn 2017

Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan
Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Wajib mendapatkan rekomendasi sebelum mendapatkan
persetujuan ekspor

Tata cara dan syarat Rekomendasi Ekspor, antara lain : (1) Komitmen
membangun smelter dalam 5 tahun, (2) Evaluasi tiap 6 bulan oleh
verifikator independen, (3) Sanksi pencabutan rekomendasi jika
tidak penuhi komitmen, (4) Surat keterangan pelunasan kewajiban
pembayaran PNBK selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

MANFAAT



KEPASTIAN
USAHA TERJAMIN
SESUAI DENGAN
MASA OPERASI



MENDORONG
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
SMELTER



PENINGKATAN
HARGA JUAL
PRODUK MINERAL
YANG DIOLAH
DAN/ATAU
DIMURNIKAN



MENAMBAH
LAPANGAN
KERJA DARI
PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN



PENINGKATAN
PERAN NEGARA /
NASIONAL DALAM
PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN





8 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017



No	Indikator Kinerja	Target 2017
1	Produksi Batubara	477Juta Ton
2	DMO	108 Juta Ton
3	Reklamasi	6.800 Ha
4	Smelter	4 Unit
5	Penerimaan Negara	Rp. 32,4 T
6	Investasi Minerba	Rp 82 T ~ 6.909 Juta USD
7	Amandemen KK dan PKP2B	KK : 25 Perusahaan PKP2B : 47 Perusahaan
8	Penataan IUP	Penataan IUP tidak ditargetkan di tahun 2017





MINERAL DAN BATUBARA

JUMLAH AMANDEMEN KONTRAK



47 PKP2B & 25 KK Target 2017
15 PKP2B & 14 KK Capaian 2017
37 PKP2B & 21 KK Total Keseluruhan
(sudah ttd amandemen)

Amandemen kontrak dengan mempertimbangkan penerimaan negara, divestasi saham, kelanjutan operasi pertambangan dan kewajiban pengolahan dan pemurnian

PENATAAN IUP | CNC / TOTAL IUP



$\frac{6.202}{9.370}$ (2016)¹ | $\frac{6.058}{9.370}$ (2017)²

Evaluasi penertiban IUP mengacu pada peraturan yang berlaku. 439 IUP diantaranya sudah dicabut oleh Daerah (dari 2016 s.d 2017) serta 725 IUP lainnya sedang proses CnC.

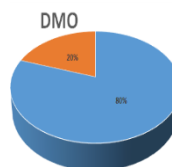
PRODUKSI BATUBARA | Juta Ton



477 Target 2017
139 Capaian 2017 (29%)
456 Realisasi 2016

Produksi batubara dikendalikan dalam rangka konservasi, optimalisasi ekspor dan peningkatan pemanfaatan domestik untuk peningkatan kedaulatan energi

PEMANFAATAN BATUBARA DOMESTIK | Juta Ton



108 Target 2017
30,8 Capaian 2017 (29%)
90,5 Realisasi 2016

Menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri

¹ Capaian 2016

² Capaian Semester I 2017





MINERAL DAN BATUBARA



LUAS REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG | Hektar



6.800 Target 2017

1.921 Capaian 2017 (28%)

6.876 Realisasi 2016

Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, menyerahkan dana jaminan reklamasi menjadi kesatuan proses kegiatan pertambangan yang wajib dilaksanakan

PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN & PEMURNIAN | Unit per Tahun



4 Target 2017

2 Capaian 2017 (50%)

2 Realisasi 2016

- Peningkatan kepatuhan terhadap komitmen pembangunan smelter melalui evaluasi izin ekspor
- Target 2017 berbeda dengan Target 2016. Pada Sisa 2 target smelter di tahun 2016 akan selesai di tahun 2017, dan akan tetap dihitung sebagai kinerja untuk tahun 2016.

PENERIMAAN NEGARA | Triliun Rupiah



32,4

Target 2017

18,27

Capaian 2017 (56%)

27,21

Realisasi 2016

Peningkatan kepatuhan pembayaran kewajiban perusahaan

INVESTASI | Juta USD



6.909

Target 2017

2.500*)

Capaian 2017 (36%)

7.228

Realisasi 2016

*) Realisasi investasi 2017 terdiri dari data KK, PKP2B, IUP BUMN, IUJP serta Smelter Capaian per Triwulan II





PERKEMBANGAN ISU PT FI

PENYELESAIAN JANGKA PENDEK

1. PT Freeport Indonesia telah menerima IUPK Operasi Produksi yang berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal 10 Februari 2017
2. Selama jangka waktu 8 (delapan) bulan, dilakukan pembahasan mengenai penyelesaian jangka panjang kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia.

PENYELESAIAN JANGKA PANJANG

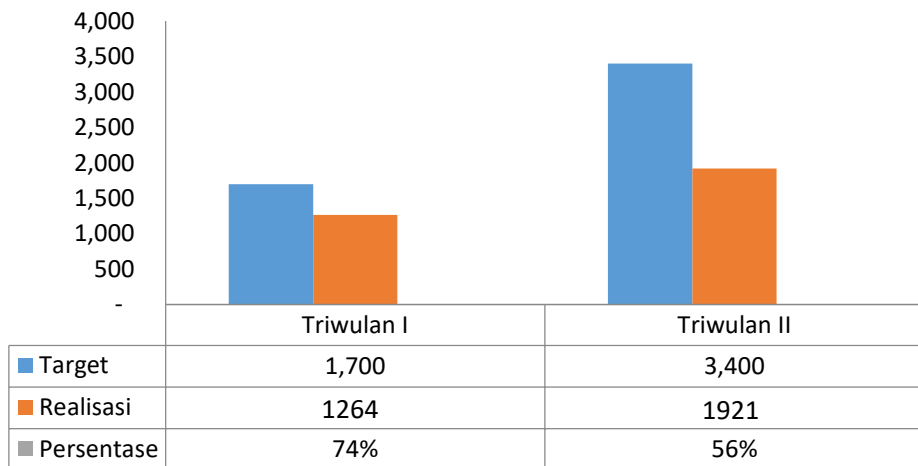
1. Telah dibentuk Tim Koordinasi antar Kementerian melalui Kepmen ESDM Nomor 1060 K/73/MEM/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan PTFI.
2. Dalam pembahasan dengan Tim Koordinasi, PT Freeport Indonesia menyampaikan 3 (tiga) dokumen proposal, yaitu:
 - a. Usulan Perjanjian Stabilitas Investasi yang memuat ketentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban PT FI dalam melaksanakan IUPK Operasi Produksi;
 - b. Usulan SK Menteri ESDM mengenai IUPK kepada PT FI; dan
 - c. Usulan Peraturan Pemerintah sebagai salah satu produk peraturan perundangan yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian Stabilitas Investasi.
3. Dalam perkembangannya PT Freeport bersedia membahas penyelesaian dalam bentuk SK IUPK OP (beserta regulasi pendukung apabila diperlukan).



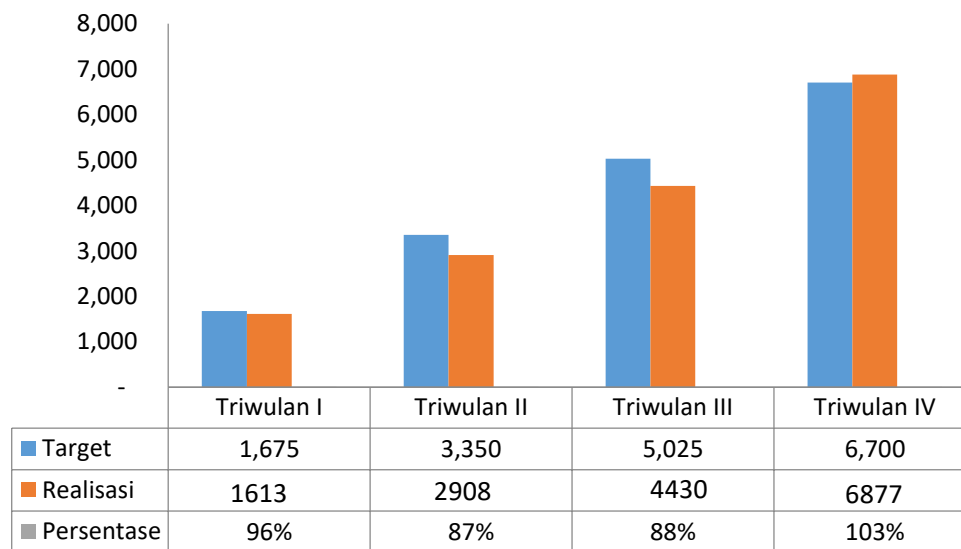


PERBANDINGAN CAPAIAN REKLAMASI 2017/2016

Reklamasi Tahun 2017



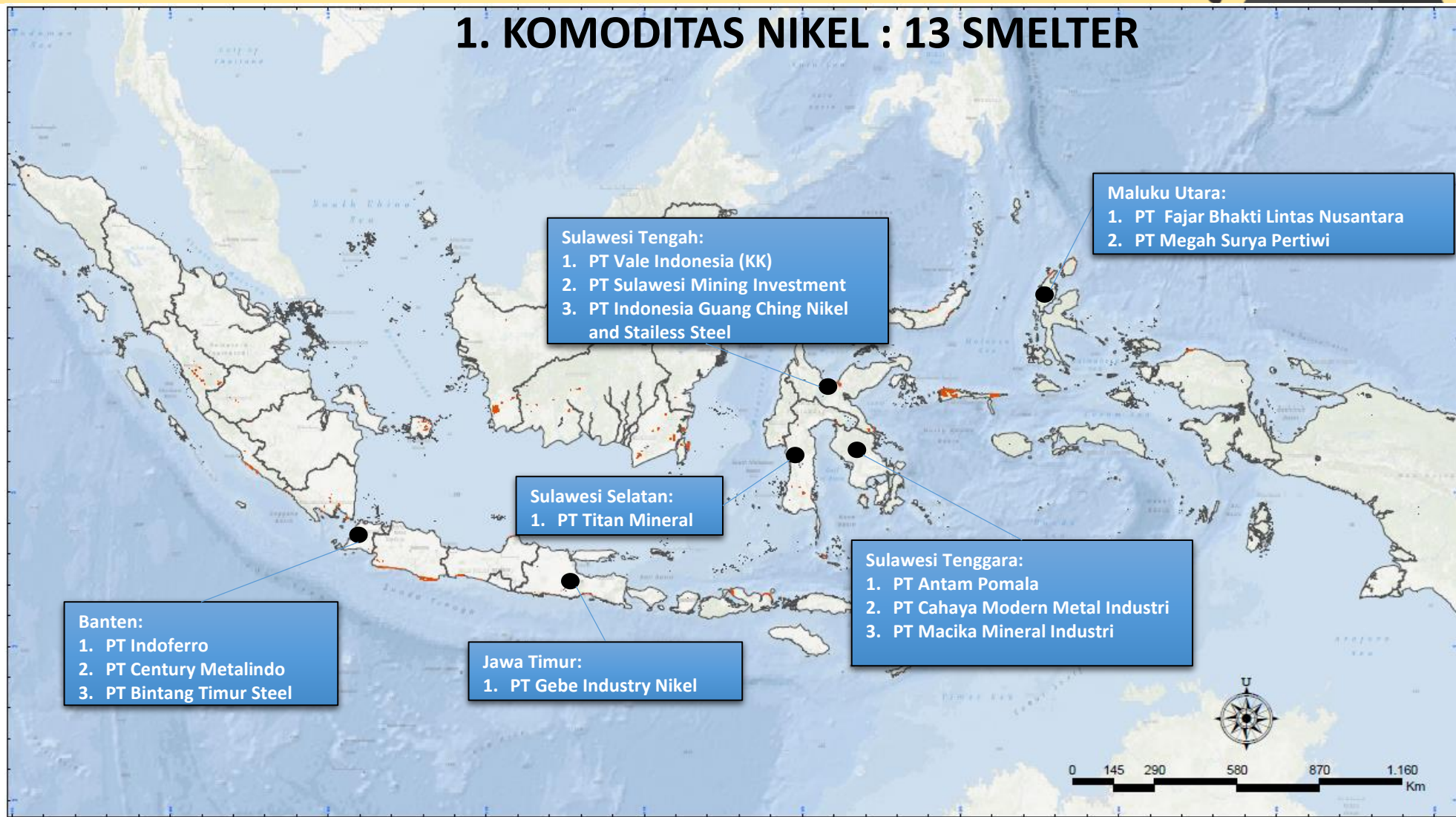
Reklamasi Tahun 2016





PETA FASILITAS PENGOLAHAN & PEMURNIAN *EXISTING* (1/1)

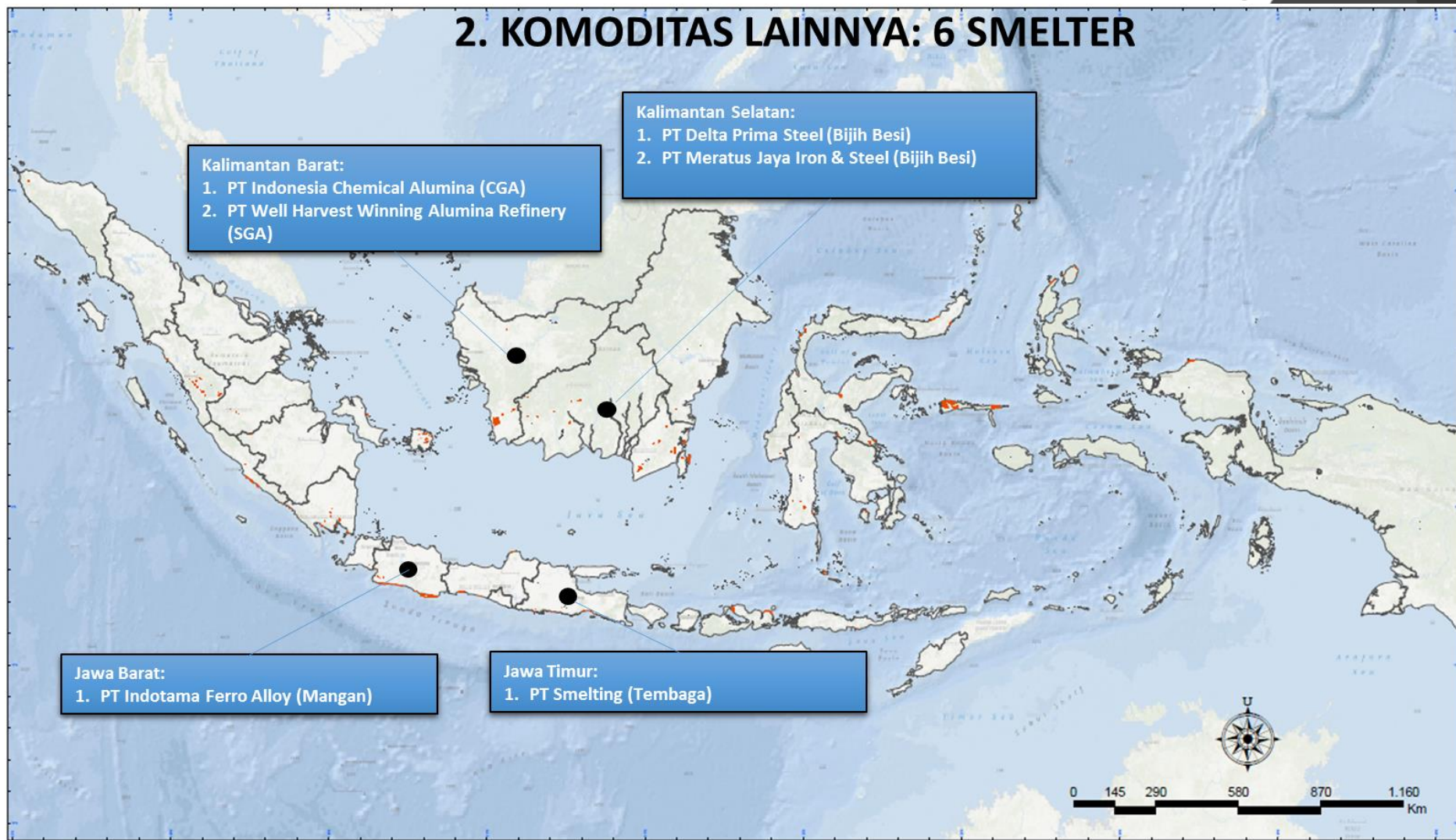
1. KOMODITAS NIKEL : 13 SMELTER





PETA FASILITAS PENGOLAHAN & PEMURNIAN *EXISTING* (1/2)

2. KOMODITAS LAINNYA: 6 SMELTER





TERIMA KASIH

Jujur – Profesional – Melayani – Inovatif - Berarti

www.esdm.go.id



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)